

**LAPORAN MBKM By Design FKM UNAIR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3APPKB) KOTA SURABAYA**

**IDENTIFIKASI PELAKSANAAN SEKOLAH SIAGA
KEPENDUDUKAN (SSK) BERKATEGORI
PARIPURNA
DI SMPN 46 SURABAYA**



Muhammad Rizal Shilchy Arif

NIM. 102011133222

Divisi Biostatistika dan Kependudukan

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA**

2023

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG MBKM
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA SURABAYA**

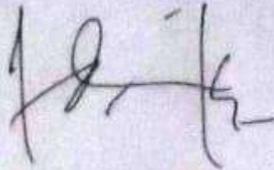
Disusun Oleh:

Muhammad Rizal Shilchy Arif

NIM. 102011133222

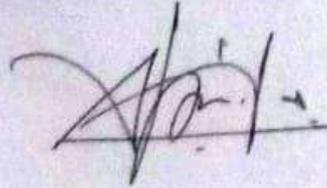
Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing Magang MBKM
Divisi Biostatistika dan
Kependudukan



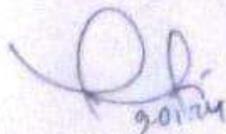
Dr. Diah Indriani, S.Si, M.Si.
NIP. 197605032002122001

Pembimbing Lapangan Magang
MBKM DP3APPKB



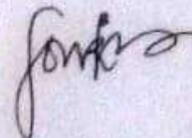
Agung Hendro Saputro, S.H.

Koordinator Program Studi Kesehatan
Masyarakat Program Pendidikan
Sarjana



Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes.
NIP. 197311151999032002

Ketua Divisi
Biostatistika dan Kependudukan



Dr. Soenarnatalina Melaniani, Ir.,
M.Kes.
NIP. 196012251990032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan MBKM *by Design* FKM UNAIR di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3APPKB) dengan judul “**IDENTIFIKASI PELAKSANAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) BERKATEGORI PARIPURNA DI SMPN 46 SURABAYA**”. Dalam penyusunan dan penulisan laporan magang ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, dengan senang hati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Santi Martini dr., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
2. Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes., selaku koordinator Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat
3. Dr. Fariani Syahrul, S.KM., M.Kes selaku Ketua Departemen Epidemiologi, Biostatistika Kependudukan, dan Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku (EBIOP) di Fakultas Kesehatan Masyarakat.
4. Dr. Diah Indriani, S.Si, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik MBKM *by Design* FKM UNAIR
5. Agung Hendro Saputro, S.H. selaku pembimbing lapangan MBKM *by Design* FKM UNAIR di DP3APPKB
6. Agung Hendra Saputro, S.H. selaku dosen pembimbing lapangan MBKM *by design* FKM UNAIR di DP3APPKB
7. Keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga laporan MBKM *by Design* FKM UNAIR ini berguna dan bermanfaat baik diri sendiri maupun pihak lain.

Surabaya, 11 Desember 2023

Muhammad Rizal Shilchy Arif

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	2
1.3 MANFAAT	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Sekolah Siaga Kependudukan	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	11
3.1 Lokasi MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR	11
3.2 Waktu Pelaksanaan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR	11
3.3 Metode Pelaksanaan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR	11
3.4 Teknik Pengumpulan Data	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Gambaran Umum Instansi	13
4.1.1 Lokasi instansi	13
4.1.2 Struktur organisasi DP3APPKB Kota Surabaya	13
4.1.3 Visi dan misi DP3APPKB Kota Surabaya	14
4.1.4 Tugas dan fungsi DP3APPKB	14
4.2 Identifikasi Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Berkategori Paripurna pada SMPN 46 Surabaya	15
4.3 Pembelajaran Pencapaian <i>Learning Outcome</i> Mata Kuliah	19
4.3.1 Aplikasi komputer biostatistika	19
4.3.2 Aplikasi komputer analisis kependudukan	24
4.3.3 Teknik sampling dan penentuan besar sampel	24
4.3.4 Sistem informasi geografis	24

4.3.5	Penilaian kritis biostatistika dan kependudukan	26
4.3.6	Metode penelitian.....	26
4.3.7	Teknik pengukuran fertilitas, KB, dan mortalitas	26
4.3.8	Aspek kesehatan lingkungan dalam penanganan bencana	26
4.3.9	Asuransi Kesehatan	27
4.4	Kendala Pelaksanaan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR.....	27
BAB V PENUTUP.....		28
5.1	Kesimpulan.....	28
5.2	Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA		29
LAMPIRAN.....		31

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Sekolah Sasaran per Wilayah	19
Tabel 4.2 Distribusi Sekolah Sasaran per Jenjang Pendidikan	20
Tabel 4.3 Ketersediaan SK Kepala Sekolah	20
Tabel 4.4 Ketersediaan Pojok Kependudukan	20
Tabel 4.5 Keikutsertaan Sekolah dalam Sosialisasi SSK.....	21
Tabel 4.6 Jumlah Guru yang Telah Diorientasi	21
Tabel 4.7 Mata Pelajaran yang Telah Terintegrasi Materi Kependudukan	22
Tabel 4.8 Ketersediaan Ekstrakurikuler Terintegrasi Materi Kependudukan.....	22
Tabel 4.9 Ketersediaan Papan Nama SSK	23
Tabel 4.10 Ketersediaan PIK-R	23
Tabel 4.11 Tabulasi Silang Ketersediaan SK Kepala Sekolah dengan Pojok Kependudukan.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3APPKB Kota Surabaya	13
Gambar 4.2 SK SSK SMPN 46 Surabaya.....	15
Gambar 4.3 Keikutsertaan SMPN 46 Surabaya dalam Sosialisasi SSK	16
Gambar 4.4 Lampiran SK SSK SMPN 46 Surabaya	17
Gambar 4.5 RPP SMPN 46 Surabaya yang terintegrasikan dengan SSK.....	17
Gambar 4.6 Pojok Kependudukan SMPN 46 Surabaya.....	18
Gambar 4.7 <i>Kegiatan Kesiswaan</i> yang mengandung konten kependudukan	19
Gambar 4.8 Peta SSK berdasarkan Ketersediaan Pojok Kependudukan per Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2023.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. <i>Logbook MBKM by Design FKM UNAIR</i>	31
Lampiran II <i>Dokumentasi kegiatan selama magang</i>	37
Lampiran III <i>Surat Penugasan Asesmen SSK</i>	41
Lampiran III <i>Surat Penugasan Asesmen SSK</i>	42
Lampiran III <i>Surat Penugasan Asesmen SSK</i>	43
Lampiran IV <i>Surat Penugasan Adovaksi SSK</i>	44
Lampiran IV <i>Surat Penugasan Adovaksi SSK</i>	45
Lampiran IV <i>Surat Penugasan Adovaksi SSK</i>	46
Lampiran V <i>Surat Pemberitahuan Sosialisasi SSK</i>	47
Lampiran VI. <i>Sertifikat MBKM by Design FKM UNAIR Tahun 2023</i>	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (UNAIR) merancang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud. Program ini disebut sebagai MBKM by Design oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (UNAIR). Pada dasarnya, program MBKM adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk belajar di luar program studi selama tiga semester. Oleh karena itu, MBKM by Design FKM UNAIR dirancang untuk mahasiswa FKM UNAIR dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga kemitraan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan dari program sarjana kesehatan masyarakat.

Program MBKM by Design FKM UNAIR 2023 memiliki 31 instansi mitra dan dimulai pada semester ketujuh sebagai magang atau proyek mandiri. Selanjutnya, penempatan siswa akan disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi siswa dari masing-masing peminatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surabaya adalah salah satu lembaga yang terdaftar dalam program MBKM by Design FKM UNAIR. Magang diikuti oleh 24 mahasiswa biostatistika dan kesehatan reproduksi.

Kependudukan bukan hanya masalah jumlah, seperti kelahiran dan kematian, tetapi juga masalah kualitas, kesejahteraan, administrasi penduduk, persebaran, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, agama, dan lingkungan. Bonus Demografi diprediksi akan terjadi di Indonesia pada sekitar tahun 2020 hingga 2035. Bonus demografi Indonesia, dengan 69,7% penduduk usia produktif, diperkirakan akan mencapai

puncaknya pada tahun 2030. Dengan manajemen yang tepat, ini dapat menjadi momentum untuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut membuat kependudukan menjadi suatu urgensi bagi Bangsa Indonesia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menciptakan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Program ini merupakan salah satu program unggulan DP3AP2KB. Program ini bertujuan untuk membentuk Generasi Berencana (GenRe) mulai dari tingkat sekolah dengan memasukkan materi tentang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga ke dalam kurikulum sekolah. Tujuan program SSK adalah untuk meningkatkan sikap dan tanggung jawab siswa serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan masalah dan dinamika kependudukan.

Ada 168 sekolah di Kota Surabaya yang menjadi sasaran program SSK. Namun, tidak semua sekolah telah menerapkan program karena beberapa masalah, seperti kekurangan informasi, kekurangan sumber daya, dan kesiapan sekolah yang kurang. Laporan magang ini dibuat untuk meninjau tentang program SSK pada SMPN 46 yang sudah berkategori paripurna.

1.2 TUJUAN

1.1.1 Tujuan Umum

Kegiatan dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sebagai integrasi keilmuan Kependudukan pada ruang lingkup pendidikan formal.

1.1.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui tentang gambaran umum dan subkegiatan pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMPN 46
2. Meninjau pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMPN 46
3. Mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program Sekolah

Siaga Kependudukan (SSK) di SMPN 46 yang berkategori paripurna

1.3 MANFAAT

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya

1.1.3 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh wawasan dan pemahaman tentang integrasi teori Kependudukan di lapangan
2. Memahami terkait gambaran umum pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMPN 46
3. Mengembangkan kompetensi dan kemampuan mahasiswa di lapangan dalam melakukan identifikasi dan observasi terkait pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMPN 46

1.1.4 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu institusi pendidikan dan institusi tempat magang dalam hal pendidikan
2. Terlaksananya FKM UNAIR dalam memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung di lapangan dengan mengimplementasikan keilmuan yang telah diperoleh.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan saran untuk pelaksanaan magang periode berikutnya

1.1.5 Manfaat Bagi Perusahaan (Instansi/ Dinas)

1. Dapat membantu memberikan masukan sekaligus bahan pertimbangan untuk kemajuan baik dari segi teknis maupun administrative.
2. Sebagai bahan evaluasi proses berjalannya program SSK.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sekolah Siaga Kependudukan

2.2.1. Definisi Umum

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang memasukkan materi tentang keluarga berencana dan kependudukan ke dalam mata pelajaran atau muatan lokal. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendorong pembentukan generasi berencana (GenRe). Program ini adalah hasil kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan BKKBN. Program ini menuntut guru untuk memahami masalah kependudukan bersama dengan siswa mereka.

Pembentukan SSK didasarkan pada upaya pemerintah untuk mengatasi Bonus Demografi, yang diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2020–2035. SSK diharapkan dapat menjadi salah satu metode pengendalian pertumbuhan penduduk mulai dari skala kecil. Dengan demikian, program ini dilaksanakan di sekolah yang merupakan salah satu pihak yang berkontribusi pada perubahan, sebagai ruang lingkup pendidikan formal.

Selain itu, diharapkan bahwa siswa yang menjadi sasaran program ini akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang kependudukan mulai dari usia dini. Diharapkan bahwa program SSK untuk siswa secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi dan kondisi kependudukan di lingkungan mereka. Selain itu, diharapkan bahwa program ini membantu siswa menumbuhkan dan meningkatkan sikap bertanggung jawab sehingga mereka dapat menjadi lebih peka terhadap masalah dan dinamika kependudukan yang terjadi di lingkungan mereka.

Perlu diingat bahwa pelajaran kependudukan telah ada di pendidikan formal sejak lama, terutama di sekolah. Namun,

pelajaran ini masih terselip secara implisit dan hanya terdiri dari teks, padahal pelajaran harus aplikatif sehingga siswa dapat memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan nyata.

2.2.2. Tujuan & Manfaat SSK

Tujuan dan manfaat SSK sebagai berikut:

1. Peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang isu dan permasalahan kependudukan
2. Peserta didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas
3. Peserta didik memiliki pengetahuan dan peka terhadap masalah dan manfaat kependudukan setempat
4. Peserta didik mampu menyajikan dan menginterpretasikan data mikro kependudukan dalam bentuk peta, grafik, atau digital
5. Mengurangi angka putus sekolah dan kasus terkait kependudukan lainnya
6. Meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik tentang manfaat dan dampak kependudukan.

2.2.3. Tahapan Pembentukan SSK

Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan terdiri dari tahapan yang dimulai dari koordinasi, sosialisasi dan orientasi, penyiapan kelengkapan, hingga peresmian.

1. Pengkoordinasian pihak terkait

Untuk membentuk SSK di setiap sekolah, perlu dilaksanakan koordinasi antar pihak yang terlibat, termasuk pihak sekolah, OPD Keluarga Berencana, dan Dinas Pendidikan setempat.

2. Sosialisasi penyamaan persepsi

Setelah koordinasi selesai, terjadi sosialisasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar sekolah memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan SSK. Selain itu, kegiatan orientasi hanya melibatkan tenaga pendidik dengan memberikan materi tentang kependudukan dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah itu, rencana kerja untuk menerapkan SSK di sekolah akan dibuat.

3. **Penyiapan Kelengkapan**

Apabila rencana kerja telah dibuat, kelengkapan instrumen SSK harus disiapkan. Beberapa instrumen yang harus disiapkan termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, ketersediaan Pojok Kependudukan, dan penerapan materi kependudukan dalam kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler.

4. **Legalisasi**

Dengan menggunakan Surat Keputusan Kepala Sekolah, program SSK secara resmi ditetapkan dan dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan. Ini dilakukan dengan memulai kegiatan yang ada dalam program, seperti pelajaran yang menggabungkan topik kependudukan dan memulai pojok kependudukan di sekolah.

2.2.4. **Klasifikasi SSK**

Terdapat dua klasifikasi sekolah dalam program SSK. Klasifikasi tersebut terdiri atas tingkat dasar dan paripurna. Ada pun kriteria klasifikasi tersebut dengan sebagai berikut.

Indikator	Klasifikasi		Bukti/Output
	Dasar	Paripurna	
Surat Keputusan SSK	V	V	Dokumen berupa SK/Peraturan/S

			E dari pihak berwenang
Keikutsertaan dalam Kegiatan Sosialisasi SSK	V	V	Dokumentasi kegiatan berupa foto
Orientasi penyusunan RPP terintegrasi materi Kependudukan	1-2 guru yang mendapatkan orientasi	>2 guru mendapatkan orientasi	1. Foto 2. Rancangan RPP 3. Sertifikat (apabila ada)
Tersusunnya RPP	1-2 RPP	>2 RPP	Dokumen RPP sesuai mata pelajaran
Koordinasi & Penguatan SSK	1 kali pertemuan bahas SSK	>2 kali pertemuan bahas SSK	1. Foto 2. Notulen 3. Daftar Hadir
Pojok Kependudukan	ada materi kependudukan di perpustakaan	Terdapat ruangan tersendiri sesuai juklak SSK	1. Foto 2. Perpustakaan maupun Pojok Kependudukan
Kegiatan Kesiswaan yang mengandung konten	1 Kegiatan	>1 Kegiatan	1. Foto 2. Dokumen materi Kependudukan

Kependudukan			3. Daftar hadir siswa
--------------	--	--	-----------------------

Terdapat 2 klasifikasi SSK di sekolah, yaitu Dasar dan Paripurna. Untuk menjadi SSK Paripurna, sekolah harus memenuhi kriteria klasifikasi Paripurna yang terdapat pada tabel di atas. Adapun penjelasan klasifikasi SSK Paripurna yakni sebagai berikut.

a. SK Penunjukan SSK

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna apabila sudah memiliki SK penunjukan SSK. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya dokumen berupa SK/Peraturan/Instruksi/SE dari pejabat yang berwenang.

b. Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna apabila telah mengikuti kegiatan sosialisasi SSK. Pada tahun 2023, pihak DP3APPKB sudah pernah melaksanakan sosialisasi SSK di Gedung Siola lantai 4 pada bulan Mei. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan 1 guru dan 1 siswa pada masing-masing sekolah. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah pernah mengikuti sosialisasi SSK yakni adanya dokumentasi kegiatan berupa foto.

c. Orientasi penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna apabila terdapat lebih dari 2 guru yang terlibat dalam penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah tersebut sudah melibatkan lebih dari 2 guru dalam penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan, yaitu adanya foto dan rancangan RPP. Selain itu, dapat pula menyertakan sertifikat jika ada.

d. Tersusunnya RPP

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna apabila telah disusun lebih dari 2 RPP terintegrasi materi kependudukan. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah tersebut sudah menyusun RPP terintegrasi materi kependudukan, yaitu dengan tersedianya dokumen RPP sesuai dengan mata pelajaran yang terintegrasi materi kependudukan.

e. Koordinasi dan Penguatan SSK

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna apabila telah mengikuti koordinasi dan penguatan SSK lebih dari sekali pertemuan bahas SSK. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah tersebut pernah mengikuti koordinasi dan penguatan SSK yaitu dengan adanya foto, notulen, dan daftar hadir dalam kegiatan tersebut.

f. Pojok Kependudukan

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna apabila dalam sekolah tersebut terdapat pojok kependudukan dengan ruangan tersendiri. Ruang tersebut menyediakan bacaan khusus untuk materi kependudukan. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa di sekolah terdapat pojok kependudukan, yaitu adanya foto dan ruang perpustakaan maupun pojok kependudukan itu sendiri.

g. Kegiatan kesiswaan yang mengandung konten kependudukan

Sekolah dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna apabila sekolah tersebut melaksanakan kegiatan kesiswaan yang mengandung konten kependudukan lebih dari satu kegiatan. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa

sekolah sudah melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu adanya foto kegiatan dan dokumen materi kependudukan yang menjadi tema kegiatan atau disisipkan dalam kegiatan. Selain itu, dapat pula disertakan daftar hadir siswa yang mengikuti kegiatan tersebut.

2.2.5. Pengelolaan SSK

Semua pihak yang terlibat dalam menjalankan dan mengelola program SSK memiliki tupoksi yang berbeda. Meskipun masing-masing pihak memiliki tugas pokok yang berbeda-beda, mereka tetap memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu bertanggung jawab atas terselenggaranya SSK. Kepala sekolah bertanggung jawab atas kegiatan, memberikan arahan dan pembinaan, dan juga memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program SSK. Selanjutnya, subjek utama program SSK adalah tenaga pendidik atau guru, dan tenaga pendidik juga bertanggung jawab untuk membimbing kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler terkait kependudukan.

Diharapkan siswa tidak hanya berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan berpartisipasi dalam kegiatan kesiswaan, terutama yang berkaitan dengan kependudukan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi MBKM *by Design* FKM UNAIR

Lokasi MBKM *by design* FKM UNAIR berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya yang bertepatan di Jl. Kedungsari No.18, RT.02/RW.01, Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60261.

3.2 Waktu Pelaksanaan MBKM *by Design* FKM UNAIR

Pelaksanaan MBKM *by design* FKM UNAIR dilaksanakan pada semester 7 dimulai dari 2 Oktober 2023 sampai dengan 22 Desember 2023. Berikut merupakan rangkaian kegiatan magang

No	Kegiatan	Minggu											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembekalan Magang												
2	Pelaksanaan Magang												
3	Seminar Hasil Magang												
4	Penyusunan Laporan												

3.3 Metode Pelaksanaan MBKM *by Design* FKM UNAIR

Pelaksanaan magang dilaksanakan secara luring dalam rangka aplikasi ilmu perkuliahan pada instansi terkait dengan rangkaian aktivitas sebagai berikut:

1. Pengenalan instansi, lingkungan kerja, serta tugas yang akan dilaksanakan saat magang.

2. Partisipasi secara aktif dengan turut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh unit kerja pada instansi tempat magang
3. Melakukan observasi dan analisis dari kegiatan yang dilaksanakan selama magang pada instansi berlangsung

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan saat melaksanakan asesmen Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ke sekolah. Data sekunder yang digunakan merupakan data yang telah dipublikasi di situs web DP3APPKB.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

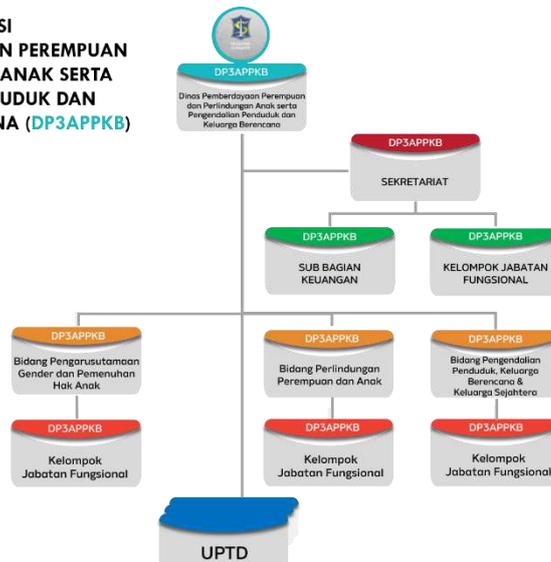
4.1.1 Lokasi instansi

Program MBKM dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. DP3APPKB Kota Surabaya terletak di Wonorejo, Tegalsari, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Dan lokasi analisis dalam tulisan ini adalah SMPN 46 Kota Surabaya.

4.1.2 Struktur organisasi DP3APPKB Kota Surabaya

Suatu perusahaan maupun kedinasan membutuhkan struktur yang baik untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi dapat menjelaskan dan menghubungkan jabatan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab setiap karyawan di perusahaan. Suatu garis komando yang kuat dan terorganisir diperlukan untuk perusahaan yang lebih besar dan lebih banyak tanggung jawab.

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3APPKB Kota Surabaya
Sumber: DP3APPKB, 2023

4.1.3 Visi dan misi DP3APPKB Kota Surabaya

1. Visi

Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat

2. Misi

2.1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

2.2. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga

2.3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat

4.1.4 Tugas dan fungsi DP3APPKB

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Berikut merupakan tugas dan fungsi dari DP3APPKB

Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
2. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai lingkup tugasnya.

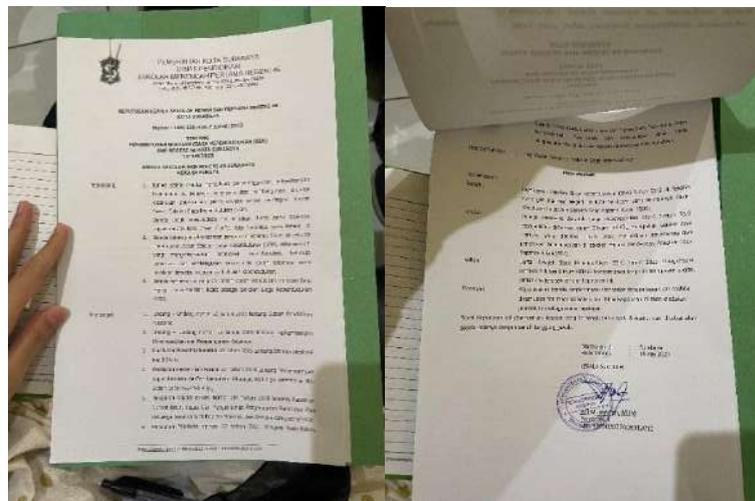
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Identifikasi Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Berkategori Paripurna pada SMPN 46 Surabaya

SMPN 46 Surabaya merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan program SSK. Setelah dilakukan assessment, program SSK di SMPN 46 terkategori paripurna. Tidak semua sekolah di Surabaya yang sudah menerapkan SSK terkategori paripurna. Terdapat beberapa Hal yang membuat SSK di SMPN 46 terkategori paripurna.

a. SK Penunjukan SSK

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna karena sudah memiliki SK penunjukan SSK. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya dokumen berupa SK SSK yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah.



Gambar 4.2 SK SSK SMPN 46 Surabaya
Sumber: Dokumen Tim Assessment

b. Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna karena telah mengikuti kegiatan sosialisasi SSK. Pada

tahun 2023, pihak DP3APPKB sudah pernah melaksanakan sosialisasi SSK di Gedung Siola lantai 4 pada bulan Mei. Perwakilan 1 guru dan 1 siswa SMPN 46 Surabaya hadir pada sosialisasi tersebut. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah pernah mengikuti sosialisasi SSK yakni adanya dokumentasi kegiatan berupa foto.



Gambar 4.3 Keikutsertaan SMPN 46 Surabaya dalam Sosialisasi SSK
Sumber: Dokumen Tim Assessment

c. Orientasi penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna karena terdapat lebih dari 2 guru yang terlibat dalam penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah tersebut sudah melibatkan lebih dari 2 guru dalam penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan, yaitu adanya foto dan rancangan RPP. Selain itu, dapat pula menyertakan sertifikat jika ada.

e. Koordinasi dan Penguatan SSK

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna karena telah mengikuti koordinasi dan penguatan SSK lebih dari sekali pertemuan bahas SSK. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah tersebut pernah mengikuti koordinasi dan penguatan SSK yaitu dengan adanya foto, notulen, dan daftar hadir dalam kegiatan tersebut.

f. Pojok Kependudukan

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna karena terdapat pojok kependudukan dengan ruangan tersendiri. Ruangan tersebut menyediakan bacaan khusus untuk materi kependudukan. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa di sekolah terdapat pojok kependudukan, yaitu adanya foto dan ruang perpustakaan maupun pojok kependudukan itu sendiri.



Gambar 4.6 Pojok Kependudukan SMPN 46 Surabaya
Sumber: Dokumen Tim Assessment

g. Kegiatan kesiswaan yang mengandung konten kependudukan

SMPN 46 Surabaya dapat dikatakan termasuk dalam SSK Paripurna karena melaksanakan kegiatan kesiswaan yang mengandung konten kependudukan lebih dari satu kegiatan. Output yang dapat dijadikan bukti bahwa sekolah sudah melaksanakan

kegiatan tersebut, yaitu adanya foto kegiatan dan dokumen materi kependudukan yang menjadi tema kegiatan atau disisipkan dalam kegiatan. Selain itu, dapat pula disertakan daftar hadir siswa yang mengikuti kegiatan tersebut.



Gambar 4.7 Kegiatan Kesiswaan yang mengandung konten kependudukan

Sumber: Dokumen Tim Assessment

4.3 Pembelajaran Pencapaian *Learning Outcome* Mata Kuliah

4.3.1 Aplikasi komputer biostatistika

Dalam proses asesmen SSK, mata kuliah aplikasi komputer biostatistika dapat digunakan untuk memberikan data deskriptif persentase berapa banyak sekolah yang telah memenuhi persyaratan untuk membentuk SSK serta untuk melihat *cross-tabulation* mengenai ketersediaan SK kepala sekolah dengan pojok kependudukan dalam proses pembentukan SSK.

1. Distribusi sekolah sasaran per wilayah

Tabel 4.1 Distribusi Sekolah Sasaran per Wilayah

Wilayah	Jumlah	Persentase (%)
Barat	27	16,1
Pusat	35	20,8
Selatan	48	28,6
Timur	27	16,1

Utara	31	18,5
Total	168	100,0

Terdapat 16,1% (n=27) sekolah di wilayah barat, 20,8% (n=35) di wilayah pusat, 28,6% (n=48) di wilayah selatan, 16,1% (n=27) di wilayah timur, dan 18,5% (n=31) sekolah di wilayah utara Kota Surabaya yang menjadi sasaran SSK.

2. Distribusi jenjang pendidikan sekolah sasaran

Tabel 4.2 Distribusi Sekolah Sasaran per Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMP/ sederajat	148	88,1
SMA/ sederajat	20	11,9
Total	168	100,0

Terdapat 88,1% (n=148) sekolah menjadi sasaran SSK berjenjang SMP/ sederajat dan 11,9% (n=20) sekolah menjadi sasaran SSK berjenjang SMA/ sederajat di Kota Surabaya.

3. Ketersediaan SK Kepala Sekolah

Tabel 4.3 Ketersediaan SK Kepala Sekolah

Ketersediaan SK Kepala Sekolah	Jumlah	Persentase (%)
Tidak ada	96	57,1
Ada	72	42,9
Total	168	100,0

Terdapat 57,1% (n=96) sekolah sasaran tidak memiliki SK Kepala Sekolah, dan 42,9% (n=72) sekolah sasaran memiliki SK kepala sekolah untuk program SSK, di Kota Surabaya.

4. Ketersediaan Pojok Kependudukan

Tabel 4.4 Ketersediaan Pojok Kependudukan

Ketersediaan Pojok Kependudukan	Jumlah	Persentase (%)
Tidak ada	125	74,4
Ada	43	25,6
Total	168	100,0

Terdapat 74,4% (n=125) sekolah sasaran tidak memiliki Pojok Kependudukan dan 25,6% (n=43) sekolah sasaran telah memiliki Pojok Kependudukan, di Kota Surabaya.

5. Sekolah yang telah mengikuti sosialisasi SSK

Tabel 4.5 Keikutsertaan Sekolah dalam Sosialisasi SSK

Keikutsertaan Sosialisasi	Jumlah	Persentase (%)
Tidak hadir	26	15,5
Hadir	142	84,5
Total	168	100,0

Terdapat 15,5% (n=26) sekolah tidak mengikuti sosialisasi SSK dan 84,5% (n=142) sekolah mengikuti sosialisasi SSK, di Kota Surabaya.

6. Sekolah yang telah melaksanakan orientasi kepada guru untuk melaksanakan integrasi materi kependudukan kedalam mata pelajaran

Tabel 4.6 Jumlah Guru yang Telah Diorientasi

Jumlah guru yang diorientasi	Jumlah	Persentase (%)
Tidak ada	108	64,3
1-2 guru	43	25,6
>2 guru	17	10,1
Total	168	100,0

Terdapat sebanyak 64,3% (n=108) sekolah sasaran belum melaksanakan orientasi kepada guru untuk menerapkan integrasi

materi kependudukan dalam pembelajaran, sebanyak 25,6% (n=43) sekolah sasaran telah melaksanakan orientasi kepada guru sebanyak 1-2 guru untuk menerapkan integrasi materi kependudukan dalam pembelajaran, dan sebanyak 10,1% (n=17) sekolah sasaran telah melaksanakan orientasi kepada guru sebanyak >2 guru untuk menerapkan integrasi materi kependudukan dalam pembelajaran, di Kota Surabaya.

7. Mata pelajaran yang telah terintegrasi materi kependudukan

Tabel 4.7 Mata Pelajaran yang Telah Terintegrasi Materi Kependudukan

Jumlah mata pelajaran terintegrasi	Jumlah	Persentase (%)
Tidak ada	104	61,9
1-2 mata pelajaran	49	29,2
>2 mata pelajaran	15	8,9
Total	168	100,0

Terdapat 61,9% (n=104) sekolah sasaran belum menerapkan integrasi materi kependudukan ke dalam mata pelajaran, 29,2% (n=49) telah menerapkannya ke dalam 1-2 mata pelajaran, dan 8,9% (n=15) telah menerapkannya ke dalam lebih dari 2 mata pelajaran. di Kota Surabaya.

8. Ekstrakurikuler yang telah terintegrasi materi kependudukan

Tabel 4.8 Ketersediaan Ekstrakurikuler Terintegrasi Materi Kependudukan

Ketersediaan ekstrakurikuler terintegrasi	Jumlah	Persentase (%)
Tidak ada	111	66,1
Ada	57	33,9
Total	168	100,0

Terdapat 66,1% (n=111) sekolah sasaran tidak memiliki ekstrakurikuler yang telah terintegrasi materi kependudukan, dan

33,9% (n=57) sekolah sasaran memiliki ekstrakurikuler yang telah terintegrasi, di Kota Surabaya.

9. Ketersediaan papan nama SSK

Tabel 4.9 Ketersediaan Papan Nama SSK

Ketersediaan Papan Nama SSK	Jumlah	Persentase (%)
Tidak ada	141	83,9
Ada	27	16,1
Total	168	100,0

Terdapat 83,9% (n=141) sekolah sasaran tidak memiliki papan nama SSK, dan 16,1% (n=27) sekolah sasaran memiliki papan nama SSK, di Kota Surabaya.

10. Ketersediaan PIK-R

Tabel 4.10 Ketersediaan PIK-R

Ketersediaan PIK-R	Jumlah	Persentase (%)
Tidak ada	73	43,5
Ada	95	56,5
Total	168	100,0

Terdapat 43,5% (n=73) sekolah sasaran tidak memiliki PIK-R, dan 56,5% (n=95) sekolah sasaran memiliki PIK-R yang terintegrasi dengan SSK, di Kota Surabaya.

11. Cross-tabulation ketersediaan SK kepala sekolah dengan pojok kependudukan dalam pembentukan SSK

Tabel 4.11 Tabulasi Silang Ketersediaan SK Kepala Sekolah dengan Pojok Kependudukan

Ketersediaan SK Kepala Sekolah	Pojok Kependudukan				Jumlah
	Tidak ada		Ada		
	n	%	n	%	
Tidak ada	93	96,9	3	3,1	96

Ada	32	44,4	40	55,6	72
Total	125		43		168

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah sasaran sebanyak 96,9% (n=93) tidak memiliki SK kepala sekolah dan tidak memiliki pojok kependudukan; ada 3,1% (n=3) sekolah sasaran yang tidak memiliki SK kepala sekolah tetapi memiliki pojok kependudukan; 44,4% (n=32) sekolah sasaran memiliki SK kepala sekolah tetapi tidak memiliki pojok kependudukan; dan 55,6% (n=40) sekolah sasaran memiliki SK kepala sekolah tetapi tidak memiliki pojok kependudukan.

4.3.2 Aplikasi komputer analisis kependudukan

Untuk melaksanakan SSK, aplikasi komputer analisis kependudukan dapat digunakan. Salah satu syarat pembentukan SSK adalah bahwa sekolah harus memiliki pojok kependudukan yang berisi informasi tentang struktur penduduk sekolah, seks rasio penduduk, dan total populasi sekolah. Dengan menggunakan program Excel, guru dan siswa dapat melakukan hal ini.

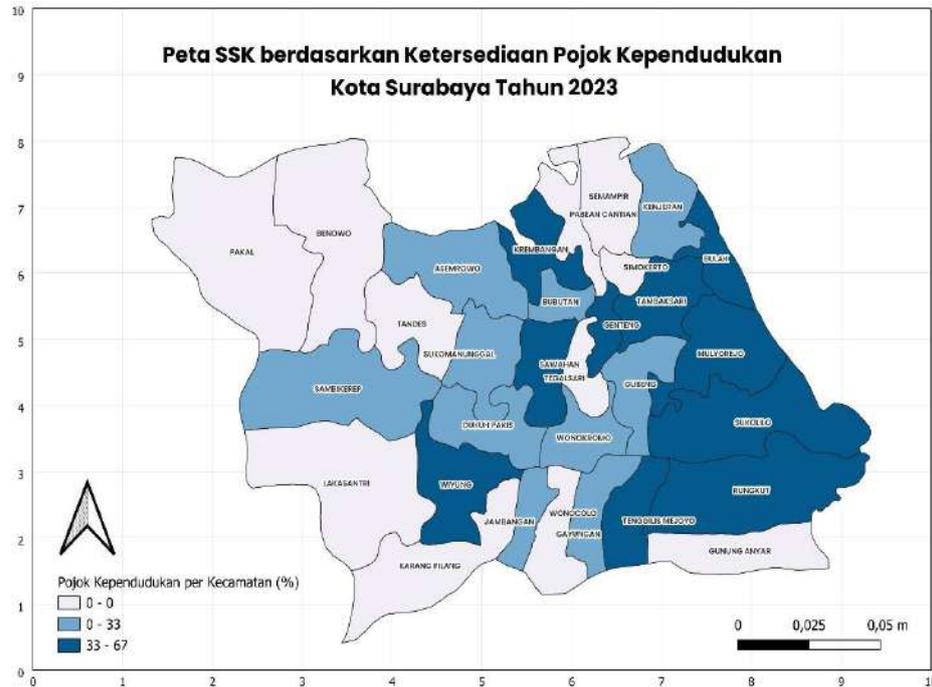
4.3.3 Teknik sampling dan penentuan besar sampel

Selama pelaksanaan SSK, DP3APPKB menggunakan teknik *sampling non-probability* untuk memilih sekolah sasaran. Ini dilakukan karena ada banyak sekolah di Surabaya. Dengan menggunakan teknik sampling ini, DP3APPKB dapat memilih sekolah yang ingin menjadi sasaran utama dengan memberikan kriteria inklusi dan eksklusi pada pemilihan sekolah.

4.3.4 Sistem informasi geografis

Dalam pelaksanaan SSK, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk mempetakan sekolah baik yang telah maupun yang belum melakukan SSK. Ini dapat dicapai dengan menggunakan program QGIS 3.32 dengan mengumpulkan data persentase sekolah yang

memiliki pojok kependudukan per kecamatan di Kota Surabaya.



Gambar 4.8 Peta SSK berdasarkan Ketersediaan Pojok Kependudukan per Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2023
Sumber: Data diolah, 2023

Peta SSK di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di Kota Surabaya tidak memiliki pojok kependudukan di sekolah. Sekolah tersebut diantaranya yaitu Kecamatan Pakal, Benowo, Tandes, Lakasantri, Karang Pilang, Wonocolo, Gunung Anyar, Tegalsari, Pabean Cantian, Semampir, dan Simokerto. Selain itu, terdapat 10 kecamatan: Sambikerep, Asemrowo, Sukomanunggal, Dukuh Pakis, Jambangan, Gayungan, Wonokromo, Gubeng, Bubutan, memiliki pojok kependudukan sekitar 0,1-33%. Dan diketahui juga bahwa terdapat sebanyak 10 kecamatan yaitu Kecamatan Wiyung, Sawahan, Krembangan, Tenggilis Mejoyo, Rungkut, Sukolilo, Mulyorejo, Genteng, Tambaksari, dan Bulak yang memiliki pojok kependudukan sekitar 33,1-67%.

4.3.5 Penilaian kritis biostatistika dan kependudukan

Penilaian kritis biostatistika dan kependudukan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan SSK. Ketika sekolah melakukan SSK, mereka dapat menggunakan penilaian kritis biostatistika dan kependudukan untuk mengajarkan siswa tentang kependudukan. Salah satu tujuan SSK adalah agar siswa dapat menganalisis data mikro kependudukan secara sederhana dengan menyajikan data dalam bentuk peta, grafik, atau digital. Ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menilai kependudukan yang ada di sekolah, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia secara keseluruhan.

4.3.6 Metode penelitian

Metode penelitian dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan asesmen SSK. Ketika mahasiswa melakukan asesmen SSK, metode penelitian deskriptif dapat digunakan. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana SSK tersebar di berbagai sekolah.

4.3.7 Teknik pengukuran fertilitas, KB, dan mortalitas

Dalam SSK, teknik pengukuran fertilitas, KB, dan mortalitas dapat digunakan. Dengan adanya pojok kependudukan dan integrasi materi kependudukan, siswa diharapkan dapat memberikan informasi statistik sederhana tentang angka kelahiran dan kematian di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia.

4.3.8 Aspek kesehatan lingkungan dalam penanganan bencana

Dalam pelaksanaan SSK, elemen kesehatan lingkungan dalam menangani bencana dapat digunakan. Siswa diajarkan tentang kependudukan untuk mencegah konflik sosial dan budaya terjadi di Indonesia. Jika pengungsi datang ke Indonesia karena konflik tersebut, siswa dapat mempelajari bagaimana pengungsi dapat memengaruhi aspek kependudukan seperti kesehatan reproduksi dan struktur

kependudukan di tempat mereka tinggal dengan tetap memiliki pemahaman tentang kesehatan lingkungan.

4.3.9 Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan dapat diimplementasikan dalam analisis data mentah aplikasi ELSIMIL maupun aplikasi Syang Warga. Pengimputan data dilakukan karena form pendataan sebelumnya berupa data dalam lembaran form offline. Mahasiswa ditugaskan untuk memindahkan data dalam form tersebut ke dalam database digital di masing-masing aplikasi yang tersedia. Dalam proses pengimputan data, ditemukan *missing data*, salah satunya di bagian asuransi kesehatan yang dimiliki responden. Mahasiswa dituntut untuk kritis dalam mengatasi hal tersebut dengan mencari Solusi untuk membersihkan data tersebut berdasarkan wawasan mahasiswa terkait asuransi kesehatan dan juga jeterangan dari pengumpul data.

4.4 Kendala Pelaksanaan MBKM *by Design* FKM UNAIR

MBKM *by design* FKM UNAIR dilaksanakan dari tanggal 2 Oktober 2023 hingga 22 Desember 2023. Ada beberapa tantangan selama pelaksanaan, seperti keterbatasan waktu magang, yang menyebabkan semua kegiatan dimampatkan, dan sudah bergantinya susunan kepengurusan sekolah sehingga kesulitan menemukan narahubung sekolah yang tepat untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan asesmen dan advokasi SSK.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa magang merupakan suatu wadah bagi mahasiswa dalam menerapkan materi yang telah didapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang membuat SSK di SMPN 46 berkategori paripurna. Dan apabila dilihat kembali, sebenarnya mayoritas sekolah di Surabaya sangat bisa untuk mendapatkan predikat SSK paripurna apabila memahami betul terkait indikator dan instrumen dari SSK itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan kendala yang dihadapi selama kegiatan magang, maka terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sebaiknya penjelasan teknis MBKM dilaksanakan per departemen/divisi dan disarankan dilaksanakan sesuai dengan keadaan instansi.
2. Mahasiswa magang sebaiknya melaksanakan magang dengan disiplin dan percaya diri saat pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyah, A., Hartanti, F. I., & Sulistyorini, Y. (2020). Implementation Analysis Of Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) In East Java 2019. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 9(2), 137-145.
- Aini, S. (2022). Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan). *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 65-70.
- Awwaluddin, A. M., & Sadewo, F. S. (2021). Analisa Kebijakan Pendidikan Kependudukan: Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Dalam Perspektif Teori Agil Talcott Parssons. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(1), 181-191.
- Awwaluddin, A. M., & Sadewo, F. S. (2021). Analisa Kebijakan Pendidikan Kependudukan: Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Dalam Perspektif Teori Agil Talcott Parssons. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(1), 181-191.
- DP3APPKB. (2017). Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3APPKB Surabaya.
- Kartikasari, Y., & Hidayah, N. (2021). Implementasi Program Siaga Kependudukan Pada SMAN 1 Ngaglik Sleman. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10(2), 174-190.
- Oktarin, E., Pirandy, G., & Ritonga, F. U. (2023). SOSIALISASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) KEPADA GURU DAN SISWA SMAN 6 KOTA MEDAN. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 1(12), 31-40.
- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022). Partisipasi civitas akademik dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902-915.

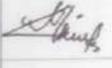
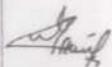
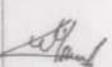
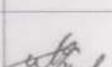
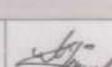
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus demografi di indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 421-439.
- Ulfah, R. (2021). Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan Melalui Pembelajaran Geografi di MAN Insan Cendekia Tanah Laut. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(2), 91-100.

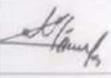
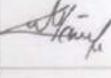
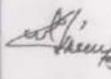
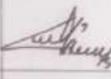
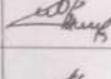
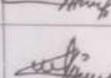
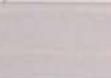
LAMPIRAN

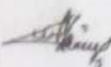
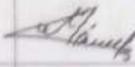
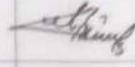
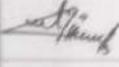
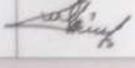
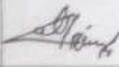
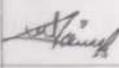
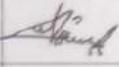
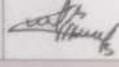
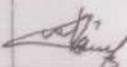
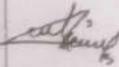
Lampiran I. Logbook MBKM by Design FKM UNAIR

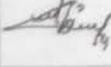
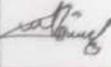
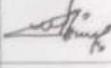
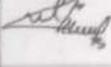
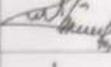
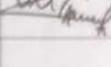
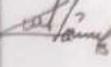
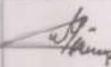
LOGBOOK MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) TAHUN 2023

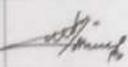
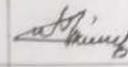
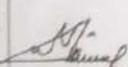
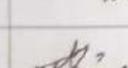
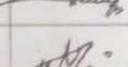
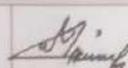
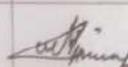
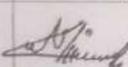
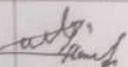
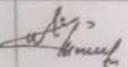
Nama : Muhammad Rizal Shilchy Arif
 NIM : 102011133222
 Instansi / Mitra : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kota Surabaya (DP3APPKB)
 Pembimbing Akademik : Dr. Diah Indriani, S.Si, M.Si.
 Pembimbing Lapangan : Agung Hendro Saputro, S.H.

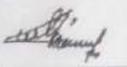
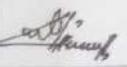
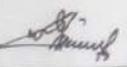
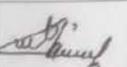
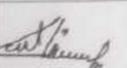
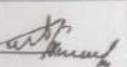
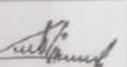
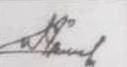
No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
Minggu Ke-1			
1.	2 Oktober 2023	Pembekalan magang yang diberikan oleh pihak DP3APPKB mengenai DP3APPKB, stunting, kesehatan reproduksi	
2.	3 Oktober 2023	1. Pembekalan mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama magang, verbal, dan aplikasi elsimil 2. Integrasi Input Aplikasi Sayang Warga Pemkot Surabaya ke Aplikasi Elsimit BKKBN Pusat, database kecamatan Asemrowo Kota Surabaya.	
3.	4 Oktober 2023	Integrasi Input Aplikasi Sayang Warga Pemkot Surabaya ke Aplikasi Elsimit BKKBN Pusat, database kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.	
4.	5 Oktober 2023	1. Integrasi Input Aplikasi Sayang Warga Pemkot Surabaya ke Aplikasi Elsimit BKKBN Pusat, database kecamatan Asemrowo Kota Surabaya. 2. Bimbingan bersama Pembimbing Akademik mengenai rencana penelitian tugas akhir dan magang	
5.	6 Oktober 2023	Integrasi Input Aplikasi Sayang Warga Pemkot Surabaya ke Aplikasi Elsimit BKKBN Pusat, database kecamatan Asemrowo Kota Surabaya.	
Minggu Ke-2			
6.	9 Oktober 2023	1. Menyusun naskah proposal skripsi 2. Mengerjakan Pre-test	

7.	10 Oktober 2023	1. Membuat <i>grand design</i> Instagram kelompok 1 2. Melaporkan data input Aplikasi Sayang Warga ke Aplikasi Elsimil kecamatan Asemrowo 3. Mengikuti pembekalan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Aplikasi SIPERINDU Membuat jadwal <i>assessment</i> SSK mulai tanggal 19-31 Oktober 2023	
8.	11 Oktober 2023	Mengikuti pengarahannya Kajian Kepedulian Remaja dalam Pencegahan Stunting.	
9.	12 Oktober 2023	Mengikuti Forum Konsultasi Publik Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Surabaya 2021-2026 di Bappedalitbang Kota Surabaya	
10.	13 Oktober 2023	1. Menyusun tinjauan pustaka mengenai konsep pemberdayaan lansia 2. Integrasi Input Aplikasi Sayang Warga Pemkot Surabaya ke Aplikasi Elsimil - BKKBN Pusat, database kecamatan Asemrowo Kota Surabaya	
Minggu Ke-3			
11.	16 Oktober 2023	Supervisi dari Pak Lutfi. Agenda supervise yaitu tindak lanjut dari kegiatan tambahan yang telah dibahas pada minggu sebelumnya serta dibagi pengerjaan ke beberapa kelompok kerja	
12.	17 Oktober 2023	Melakukan kunjungan studi banding dan diskusi PMKS di Dinas Sosial Kota Surabaya	
13.	18 Oktober 2023	Persiapan hal atau dokumen yang diperlukan untuk Assessment Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	
14.	19 Oktober 2023	Persiapan hal atau dokumen yang diperlukan untuk Assessment Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	
15.	20 Oktober 2023	Koordinasi dan persiapan Assessment Sekolah Siaga Kependudukan	
Minggu Ke-4			

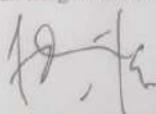
16.	23 Oktober 2023	Melaksanakan assesment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Terbuka 14 Surabaya & SMP Negeri 14 Surabaya	
17.	24 Oktober 2023	Melaksanakan assesment Sekolah Siaga Kependudukan di MTS Al-Muttaqin & SMP Katolik Karitas II Surabaya	
18.	25 Oktober 2023	Melaksanakan assesment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 53 & SMP Negeri 12	
19.	26 Oktober 2023	Melaksanakan assesment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Taman Pelajar & SMP Negeri 33	
20.	27 Oktober 2023	Melaksanakan assesment Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 42 & SMP Tanwir	
Minggu Ke-5			
21.	30 Oktober 2023	Melaksanakan assesment Sekolah Siaga Kependudukan di SMPN 2 Surabaya & SMA Hangtuah I	
22.	31 Oktober 2023	Melaksanakan assesment Sekolah Siaga Kependudukan di SMPN 46 Surabaya	
23.	1 November 2023	Melakukan input hasil assesment ke google spreadsheet dan segala kendala yang dialami oleh sekolah	
24.	2 November 2023	Melakukan analisis hasil assesment SSK kelompok	
25.	3 November 2023	Melakukan analisis hasil assesment SSK kelompok	
Minggu Ke-6			
26.	6 November 2023	Pembuatan Rencana Tindak Lanjut hasil analisis assesment SSK kelompok	
27.	7 November 2023	Presentasi hasil analisis hasil assesment SSK kelompok dan Rencana Tindak Lanjut bagi sekolah yang berkategori terdaftar dan tidak terdaftar	

28.	8 November 2023	Diskusi rencana kerja RTL sekolah siaga kependudukan	
29.	9 November 2023	Pembuatan proposal dan rencana kerja rencana tindak lanjut Sekolah Siaga Kependudukan pada 131 sekolah di Surabaya	
30.	10 November 2023	Pembuatan proposal dan rencana kerja rencana tindak lanjut Sekolah Siaga Kependudukan pada 131 sekolah di Surabaya	
Minggu Ke-7			
31.	13 November 2023	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	
32.	14 November 2023	Melakukan input data survei kepuasan masyarakat masyarakat internal di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	
33.	15 November 2023	Melakukan input data survei kepuasan masyarakat eksternal di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo	
34.	16 November 2023	Menyusun laporan magang dan proposal skripsi	
35.	17 November 2023	1. Menyusun laporan magang dan proposal skripsi 2. Melakukan koordinasi dengan kepala bidang pengendalian kependudukan dan KB mengenai rencana tindak lanjut SSK Melakukan input data audit kasus stunting ke aplikasi sayang warga surabaya	
Minggu Ke-8			
36.	20 November 2023	1. Berkoordinasi dengan pembimbing magang mengenai pelaksanaan advokasi SSK Berkoordinasi dengan seluruh peserta magang mengenai rundown pelaksanaan sosialisasi dan advokasi	
37.	21 November 2023	Menyusun laporan magang dan proposal skripsi	

38.	22 November 2023	Melaksanakan advokasi sekolah siaga kependudukan SMP Terbuka 14 Surabaya & SMP Negeri 14 Surabaya	
39.	23 November 2023	Melaksanakan advokasi sekolah siaga kependudukan SMPN 53	
40.	24 November 2023	Input data aplikasi sayang warga	
Minggu Ke-9			
41.	27 November 2023	Sosialisasi SSK di Graha Sawunggaling	
42.	28 November 2023	Menghubungi sekolah dalam rangka follow-up pembuatan SK Kepala Sekolah	
43.	29 November 2023	1. Melaksanakan evaluasi bersama mengenai pelaksanaan sosialisasi SSK pada tanggal 27 November 2023 2. Supervisi dari Dosen Pembimbing Akademik yaitu Bu Fitri	
44.	30 November 2023	Menyusun laporan magang dan proposal skripsi	
45.	1 Desember 2023	Menyusun laporan magang dan proposal skripsi	
Minggu Ke-10			
46.	4 Desember 2023	Pengerjaan proposal skripsi dan laporan magang	
47.	5 Desember 2023	Pengerjaan proposal skripsi dan laporan magang	
48.	6 Desember 2023	Pengerjaan proposal skripsi dan laporan magang	
49.	7 Desember 2023	Pengerjaan proposal skripsi dan laporan magang	
50.	8 Desember 2023	Seminar Hasil Magang	

Minggu Ke-11			
51.	11 Desember 2023	Persiapan evaluasi Sekolah Siaga Kependudukan	
52.	12 Desember 2023	Melakukan evaluasi Sekolah Siaga Kependudukan	
53.	13 Desember 2023	Persiapan seminar proposal skripsi divisi biostatistika dan kependudukan	
54.	14 Desember 2023	Persiapan seminar proposal skripsi divisi biostatistika dan kependudukan	
55.	15 Desember 2023	Persiapan seminar proposal skripsi divisi biostatistika dan kependudukan	
Minggu Ke-12			
56.	18 Desember 2023	Seminar proposal skripsi divisi biostatistika dan kependudukan	
57.	19 Desember 2023	Seminar proposal skripsi divisi biostatistika dan kependudukan	
58.	20 Desember 2023	Seminar proposal skripsi divisi biostatistika dan kependudukan	
59.	21 Desember 2023	Penutupan magang MBKM <i>by design</i> FKM UNAIR dengan DP3APPKB	
60.	22 Desember 2023	Penarikan mahasiswa magang MBKM <i>by design</i> FKM UNAIR dengan DP3APPKB	

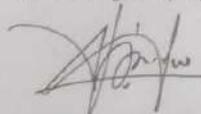
Pembimbing Akademik,



Dr. Diah Indriani, S.Si, M.Si.

NIP. 197605032002122001

Pembimbingan Lapangan,



Agung Hendro Saputro, S.H.

Lampiran II *Dokumentasi kegiatan selama magang*









Lampiran III *Surat Penugasan Asesmen SSK*



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kedungsari No. 18 Surabaya
Telp. (031) 5346317 Fax. (031) 5480904

SURAT PERINTAH

NOMOR 400.13 /10809/436.7.8/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. IDA WIDAYATI, MM
Jabatan : Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

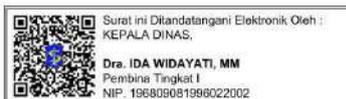
(Daftar Nama Terlampir)

Untuk : 1.Melaksanakan Penilaian Awal (assessment) Pembentukan Sekolah Siaga
Kependudukan pada :

Hari : Senin s/d Jum'at
Tanggal : 23 s/d 31 Oktober 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Lokasi : Terlampir

2.Melaporkan hasil-hasil kegiatan sebagaimana dimaksud kepada pimpinan.
3.Demikian Surat Perintah ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan
penuh rasa tanggung jawab

Surabaya, 17 Oktober 2023



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSiE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

LANJUTAN

Lampiran III *Surat Penugasan Asesmen SSK*

Lampiran Daftar Penerima Surat
Tanggal : 17 Oktober 2023
Nomor : 400.13
/10809/436.7.8/2023

Kepada :

1. Nama : Ahmad Arifal
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
2. Nama : Fajar Kusuma
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
3. Nama : Muhammad Rizal Shilchy Arif
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
4. Nama : Annisa Az Zahra
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
5. Nama : Kusuma Dewi
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
6. Nama : Rahmah Christawan
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
7. Nama : Salma Nadia
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
8. Nama : Tiara Rahmi
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
9. Nama : Difa Nur Sya'balinda
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
10. Nama : lisa Sholikhati Amalia
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
11. Nama : Faradita Diniyatuz
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
12. Nama : Hasna Hanifa
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
13. Nama : Karunia Nur Fadhilah
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
14. Nama : Laili Hanifa
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
15. Nama : Meuthia Jasmine
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
16. Nama : Mohammad Maliki Rafli
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
17. Nama : Naumi Salsabilla
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
18. Nama : Reiyarsa Dagna Arindra
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)



- Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

LANJUTAN

Lampiran III *Surat Penugasan Asesmen SSK*

19. Nama : Risdania Rifqa
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
20. Nama : Sabrina Salsa
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
21. Nama : Silvia Vaula
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
22. Nama : Zahra Syafa Kamila
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
23. Nama : Rizkita Azizah
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
24. Nama : Sri Dewi Tiara
Jabatan : Mahasiswa Unair Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Lampiran IV Surat Penugasan Advokasi SSK



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kedungsari No. 18 Surabaya
Telepon. (031) 5346317 Faksimile. (031) 5480904

SURAT PERINTAH

NOMOR 400.13 /12202/436.7.8/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. IDA WIDAYATI, MM
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

(Daftar Nama Terlampir)

Untuk : 1. Melaksanakan Advokasi Kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan pada :

Hari/Tanggal : Rabu s/d Jum'at
Tanggal : 22 s/d 23 November 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Lokasi : Terlampir

2. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud kepada pimpinan sebagai bahan acuan kerja;
3. Melaksanakan Surat Perintah Tugas ini dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya, 18 November 2023



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BS/E
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

LANJUTAN

Lampiran IV Surat Penugasan Adovaksi SSK

Lampiran Daftar Penerima Surat
Tanggal : 18 November 2023
Nomor : 400.13/12202/436.7.8/2023

Kepada :

1. Nama : Ahmad Arifal Chabib
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
2. Nama : Fajar Kusuma Shabir
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
3. Nama : Naumi Salsabilla Purwitasari
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
4. Nama : Zahra Syafa Kamila
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
5. Nama : Difa Nur Sya'balinda
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
6. Nama : Meuthia Jasmine
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
7. Nama : Mohammad Maliki Rafli
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
8. Nama : Silvia Vaula Andraresta
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
9. Nama : Salma Nadia Rahmani
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
10. Nama : Kusuma Dewi Mukti Bratajaya
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
11. Nama : Karunia Nur Fadhillah
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
12. Nama : Hasna Hanifa Nurkamila
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
13. Nama : Rahmah Christiawan
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
14. Nama : Akbar Gibran
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
15. Nama : Sabrina Salsa Anggita Panjaita
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
16. Nama : Reiyarsa Dagna Arindra
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
17. Nama : Faradita Diniyatuz Zahroh
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
18. Nama : Laili Hanifah
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

LANJUTAN

Lampiran IV *Surat Penugasan Adovaksi SSK*

19. Nama : Annisa Az Zahra
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
20. Nama : Rizkita Nur Azizah
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
21. Nama : Sri Dewi Tiara Rahmi
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
22. Nama : Muhammad Rizal Shilichy Arif
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
23. Nama : Risdania Rifqa Afrida
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
24. Nama : Elisa Sholikhati Amalia
Jabatan : Mahasiswa Unair MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)



• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSiE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Lampiran V Surat Pemberitahuan Sosialisasi SSK



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kedungsari No. 18 Surabaya
Telepon. (031) 5346317 Faksimile. (031) 5480904

Surabaya, 24 November 2023

Kepada

Yth. Ka. Dinas Pendidikan
di -
Surabaya

Nomor : 400.13 /12487/436.7.8/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Bantuan
Menghadirkan Peserta
Kegiatan Sosialisasi Sekolah
Siaga Kependudukan (SSK)
Tahun 2023

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2023 untuk Guru dan Siswa SMP/MTS di Kota Surabaya yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Pukul : 12.30 WIB - Selesai
Tempat : Graha Sawunggaling Lt. 6 Surabaya
Alamat : Jl. Jimerto No. 25 - 27 Surabaya

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara untuk menghadirkan 4 (empat) peserta dari masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah;
2. Guru Mata Pelajaran IPS/Guru Ekstrakurikuler; dan
3. Perwakilan Pengurus OSIS kelas 8 sebanyak 2 (dua) orang.

Adapun daftar nama sekolah sebagaimana terlampir.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSiE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Lampiran VI. Sertifikat MBKM by Design FKM UNAIR Tahun 2023

